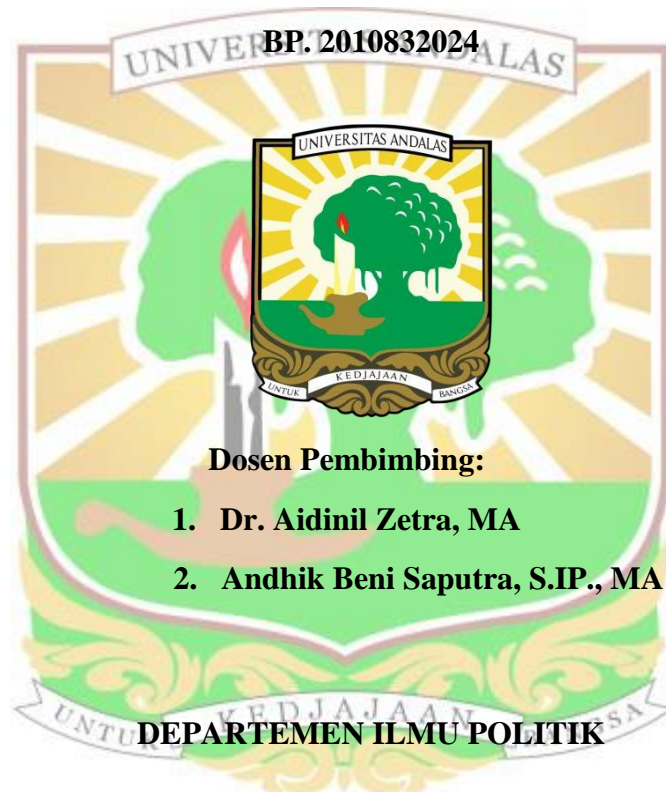


**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 5 TAHUN
2019 TENTANG PENGELOLAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN
SOSIAL DI KOTA PADANG TAHUN 2022**

SKRIPSI

Oleh:

Iqbal Athallah Yusra



Dosen Pembimbing:

- 1. Dr. Aidinil Zetra, MA**
- 2. Andhik Beni Saputra, S.IP., MA**

DEPARTEMEN ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

ABSTRAK

Kasus ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial di Kota Padang menjadi pertanyaan bagaimana implementasi dari Peraturan Menteri Sosial nomor 5 tahun 2019 tentang pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Penyaluran bantuan sosial dilakukan berdasarkan data masyarakat miskin yang ada pada DTKS. Sistem yang digunakan yaitu Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) juga tergolong sistem yang baru diaplikasikan di Kota Padang oleh pilar-pilar sosial yaitu Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). Sehingga dengan kasus ketidaktepatan sasaran penyaluran bantuan sosial tersebut menjadi tujuan dalam penelitian ini terkait bagaimana implementasi Peraturan Menteri Sosial nomor 5 tahun 2019 tentang pengelolaan DTKS khususnya di Kota Padang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus. Donald Van Metter dan Carl Van Horn memiliki enam indikator implementasi kebijakan publik yang terdiri dari, ukuran dan tujuan kebijakan; sumber daya; karakteristik agen pelaksana; sikap dan kecenderungan pelaksana; komunikasi antar-organisasi dan aktivitas pelaksana; serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Berdasarkan indikator tersebut, pengelolaan DTKS di Kota Padang cenderung masih ditunggangi kepentingan-kepentingan politik tertentu sebagai alat kampanye pada musim-musim politik. Tolak ukur masyarakat yang telah melewati proses pendataan oleh kelurahan juga tidak memiliki kejelasan terkait mekanisme yang dilakukan di pusat karena banyaknya temuan masyarakat mampu ataupun wafat yang tetap menerima bantuan. Pilar sosial juga melibatkan sumber daya tambahan yaitu dari RT/RW serta melakukan perekrutan sukarelawan tambahan selama proses pengelolaan DTKS maupun penyaluran bantuan. Sehingga hasil analisa yang diperoleh berdasarkan temuan bahwasanya implementasi PERMENSOS Nomor 5 Tahun 2019 tentang pengelolaan DTKS di Kota Padang masih belum maksimal karena masih adanya ruang intervensi politik, serta ketidaktransparanan data yang diolah oleh pusat walaupun secara teknis telah sesuai berdasarkan PERMENSOS Nomor 5 tahun 2019.

Kata Kunci: Kebijakan, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan Pengelolaan.

ABSTRACT

The case of inaccurate targeting in the distribution of social assistance in Padang City raises the question of how the implementation of the Minister of Social Affairs Regulation number 5 of 2019 concerning the management of Integrated Social Welfare Data (DTKS). The distribution of social assistance is carried out based on data on the poor in DTKS. The system used, namely the Next Generation Social Welfare Information System (SIKS-NG), is also a new system applied in Padang City by social pillars, namely Sub-district Social Welfare Workers (TKSK) and Community Social Workers (PSM). So that the case of inaccurate targeting of social assistance distribution is the aim of this research related to how the implementation of the Minister of Social Affairs Regulation number 5 of 2019 concerning the management of DTKS, especially in Padang City. This research uses a qualitative method with a case study design. Donald Van Metter and Carl Van Horn have six indicators of public policy implementation consisting of, policy size and objectives; resources; characteristics of implementing agents; attitudes and tendencies of implementers; inter-organizational communication and implementing activities; and the economic, social, and political environment. Based on these indicators, the management of DTKS in Kota Padang tends to be ridden by certain political interests as a campaign tool during political seasons. The benchmark of the community that has passed the data collection process by the kelurahan also lacks clarity regarding the mechanism carried out at the center because there are many findings of well-off or deceased people who still receive assistance. The social pillar also involves additional resources, namely from RT/RW and the recruitment of additional volunteers during the process of managing DTKS and distributing aid. Thus, the results of the analysis obtained based on the findings that the implementation of PERMENSOS Number 5 of 2019 concerning DTKS management in Padang City is still not optimal because there is still room for political intervention, as well as the non-transparency of data processed by the center even though it is technically in accordance with PERMENSOS Number 5 of 2019.

Keywords: Policy, Integrated Social Welfare Data and Management.